



Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Studi Kasus: Provinsi Bali)

Armelia Ayunda Lestari^{1*}, Muhamad Rizki Zulfikar², Ajeng Fitria Sabila³, Alia Ariyanti⁴, Laila Hidayani⁵, Al Farizi Zaldira⁶, Ade Budi Setiawan⁷

¹⁻⁷Program Studi Akuntansi, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

Email: armelialestari16@gmail.com^{1}, rizkarizki855@gmail.com², rinaajeng2018@gmail.com³, alaaaariyanti@gmail.com⁴, lailahidayani23@gmail.com⁵, farizdzaldira276@gmail.com⁶, ade.budi.setiawan@unida.ac.id⁷*

**Penulis korespondensi: armelialestari16@gmail.com¹*

Abstract. This study aims to analyze the quality of the Bali Provincial Government Financial Report (LKPD) through the application of accrual-based Government Accounting Standards (SAP). This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method on the Bali Provincial Government Financial Report for the 2022–2024 fiscal years. The research data consists of secondary data obtained from LKPD that has been audited by the Supreme Audit Agency (BPK), Audit Reports (LHP), as well as laws and regulations and official documents related to the implementation of SAP. Data collection techniques were carried out through documentation and literature study. The results of the study indicate that the implementation of accrual-based SAP has improved the quality of regional financial reporting, as reflected in the completeness of financial reports and the achievement of an Unqualified Opinion (WTP). However, there are still weaknesses in regional asset management, consistency of disclosure, and human resource readiness, so that continuous strengthening of regional financial management is needed.

Keywords: Accrual-Based Accounting; Financial Statement Quality; Government Accounting Standards; LKPD; Local Government

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada LKPD Provinsi Bali tahun anggaran 2022–2024. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari LKPD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penerapan SAP. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual telah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah, yang tercermin dari kelengkapan laporan keuangan dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset daerah, konsistensi pengungkapan, serta kesiapan sumber daya manusia, sehingga diperlukan penguatan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci: Akuntansi Berbasis Akrual; Kualitas Laporan Keuangan; LKPD; Pemerintah Daerah; Standar Akuntansi Pemerintahan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan setiap lembaga pemerintahan memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan guna menciptakan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas yang dikenal dengan prinsip *good governance*. Penerapan prinsip tersebut dalam sistem pemerintahan di Indonesia menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam manajemen keuangan nasional. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap entitas pelaporan untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala

(Jusmani et al., 2022). Sejalan dengan semangat otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan besar dalam mengelola sumber daya publik, yang konsekuensinya harus dibarengi dengan penyajian laporan keuangan yang baik sebagai cara untuk kewajibannya kepada masyarakat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan bernilai apabila memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, terjamin, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk menjamin konsistensi kualitas tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual yang diharapkan dapat memberikan informasi utuh tentang hak posisi keuangan dan kewajiban pemerintah (Lamonisi, 2016). Penerapan basis tujuan dari akrual ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan kemandirian keuangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan (Halawa & Nazah, 2023).

Namun, dalam praktiknya, pencapaian kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan SAP masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia, efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Kompetensi aparatur pengelola keuangan yang memadai terbukti berpengaruh positif terhadap keandalan dan relevansi laporan keuangan pemerintah daerah (Suhardi, 2025). Selain itu, penerapan SPIP yang efektif mampu meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan (Natanael & Jamaris, 2023). Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan teknologi informasi akuntansi juga terbukti meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi laporan keuangan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan teknis aparatur dalam mengoperasikan sistem tersebut Khairunnas et al., 2021; Jamaluddin & Muttaqim, 2025 dan Evicahyani & Setiawina, 2016). Fenomena ini menunjukkan bahwa standarisasi melalui SAP tidak akan maksimal tanpa dukungan kapasitas SDM dan teknologi informasi yang memadai. Provinsi Bali sebagai salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang pesat memiliki urgensi tinggi untuk terus menjaga kualitas pelaporan keuangannya. Masalah klasik seperti penatausahaan aset tetap yang belum tertib seringkali menjadi penghambat dalam peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Financial Supervisory Board (Lauma et al., 2016). Ketidaksesuaian pencatatan antara bagian akuntansi dan bagian aset dapat mengurangi informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak stabil.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai "Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Studi Kasus: Provinsi Bali". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana implementasi SAP telah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Provinsi Bali serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang masih dihadapi guna mewujudkan tata kelola keuangan yang berintegritas dan bertauhid.

2. KAJIAN TEORITIS

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat pedoman dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pada pemerintah pusat beserta kementerian/lembaganya maupun pemerintah daerah dan perangkat daerahnya (Yanti & Made, 2020; Hernusa & Royani, 2022). Penerapan SAP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dan keterbandingan pelaporan keuangan antar entitas pemerintah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Muwarni & Astuti, 2022). Dengan berpedoman pada SAP, laporan keuangan pemerintah diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah oleh para pemangku kepentingan.

Kualitas laporan keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut, yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan, serta informasi lain yang relevan mengenai aktivitas pemerintah daerah. Informasi tersebut dihasilkan dari proses pencatatan dan pengikhtisaran akun-akun keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Laporan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu memberikan gambaran yang andal dan komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menyampaikan kinerja pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat. Setiap tahun, LKPD disusun oleh pemerintah daerah dan selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan

tersebut. Hasil pemeriksaan BPK diwujudkan dalam bentuk opini audit yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKPD dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Alal Maula & Wibowo, 2022; Vidyasari & Suryono, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan dan diungkapkan secara wajar, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis menyeluruh tentang kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang diuraikan pada bagian pendahuluan dan berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penelitian ini akan menyelidiki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali. LKPD ini termasuk Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan SAP berbasis akrual. Pemilihan Provinsi Bali sebagai studi kasus didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di tengah aktivitas ekonomi yang aktif dan kerumitan pengelolaan aset di wilayah tersebut.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD Provinsi Bali yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, serta dokumen dan peraturan undang-undang resmi berkaitan lewat penerapan SAP. Data dipilih untuk memastikan keandalan informasi yang dianalisis dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data, metode dokumentasi dan studi kepustakaan digunakan. Metode dokumentasi laporan audit BPK dan laporan keuangan daerah, sedangkan studi kepustakaan meninjau buku teks, jurnal ilmiah, dan studi sebelumnya tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah penerapan SAP, dan faktor penghambat implementasinya, seperti kompetensi SDM dan pengelolaan aset.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis mampu membandingkan penyajian dan pengungkapan LKPD Provinsi Bali dengan ketentuan SAP serta karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah, yang relevan, kredibel, kompratif, dan dipahami. Hasil analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan

SAP telah meningkatkan kualitas laporan keuangan serta untuk menemukan masalah yang masih dihadapi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 hingga 2024 yang dipublikasikan secara resmi melalui laman Pemerintah Provinsi Bali (baliprov.go.id). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali dari tahun 2022 hingga 2024 merupakan bentuk pemerintah daerah mengelola dana publik selama tiga tahun anggaran berturut-turut. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, LKPD tersebut dibuat dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LKPD Provinsi Bali periode 2022–2024 mencakup komponen laporan keuangan seperti Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Operasional. Laporan keuangan yang didistribusikan selama periode ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memastikan penerapan SAP konsisten, terutama dalam konteks pemulihan dan stabilisasi ekonomi daerah pascapandemi, serta dinamika pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks.

Dari sisi pengakuan dan pengukuran, penerapan basis akrual dalam LKPD Provinsi Bali tercermin pada pencatatan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang tidak lagi semata-mata berbasis kas. Hal ini sejalan dengan tujuan SAP untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif perihal posisi keuangan dan kinerja operasional pemerintah daerah dalam satu siklus akuntansi. Kesesuaian LKPD Provinsi Bali dengan SAP juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Bali memperoleh pandangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan bahwa laporan keuangan sediakan secara normal dalam kondisi yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula, LKPD Tahun Anggaran 2024 telah melalui proses pemeriksaan BPK dan dinyatakan memenuhi prinsip kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai daerah dengan karakteristik ekonomi berbasis pariwisata, Provinsi Bali menghadapi tantangan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang signifikan selama periode 2022–2024. Oleh karena itu, analisis terhadap kualitas LKPD pada periode ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana SAP telah diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Analisis Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2022–2024

Analisis kualitas LKPD Provinsi Bali pada periode 2022–2024 dilakukan dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan terhadap ketentuan SAP serta karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dari sisi relevansi informasi keuangan, hasil analisis LKPD Provinsi Bali tahun 2022–2024 menunjukkan bahwa informasi keuangan yang disajikan secara teratur mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selama periode tersebut, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional memberikan gambaran tentang pelaksanaan anggaran, pencapaian pendapatan, dan pengelolaan belanja daerah. Namun demikian, selama beberapa tahun dalam periode pengamatan, informasi yang relevan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan melalui pengungkapan yang lebih komprehensif, terutama terkait penjelasan tentang perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan yang signifikan pada pos-pos tertentu. Namun, keterbatasan pengungkapan ini mungkin mengurangi nilai informasi laporan keuangan bagi pengguna dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal keandalan informasi keuangan LKPD Provinsi Bali periode 2022–2024, laporan yang menggunakan prinsip akuntansi berbasis akrual dan telah diaudit oleh BPK menunjukkan bahwa informasi keuangan telah memenuhi aspek keandalan. Namun, ada catatan terkait penatausahaan aset tetap dan ketidaksesuaian data antarunit pengelola. Permasalahan pengelolaan aset muncul berulang kali selama beberapa tahun anggaran, menunjukkan bahwa masalah kepercayaan laporan keuangan terus muncul. Ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem pengendalian internal yang lebih baik dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan diperlukan untuk mendukung implementasi SAP. Dari aspek dapat dibandingkan, dengan menerapkan SAP secara konsisten dari tahun 2022 hingga 2024, LKPD Provinsi Bali dapat membandingkannya satu sama lain. Dengan struktur dan format laporan keuangan yang hampir identik, analisis tren kinerja keuangan dari tahun ke tahun menjadi lebih mudah. Namun, Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan secara jelas bahwa ada penyesuaian pencatatan dan perbaikan administrasi sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tanpa pengungkapan yang memadai, perbandingan antarperiode dapat menyebabkan interpretasi yang kurang akurat.

Secara keseluruhan, dapat dipahami LKPD Provinsi Bali tahun 2022–2024 telah disusun dengan sistematis dan sesuai dengan ketentuan SAP, sehingga dapat disadari oleh yang menggunakan laporan keuangan yang memiliki pemahaman dasar tentang keuangan publik.

Penggunaan terminologi akuntansi dan kategori akun telah cocok dengan peraturan berlaku. Meskipun demikian, karena laporan keuangan berbasis akrual yang rumit pada periode tersebut, informasi harus disajikan dengan lebih jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan yang kurang rinci dapat menyulitkan pemangku kepentingan non-teknis untuk memahami informasi keuangan dengan benar.

Hasil analisis terhadap LKPD Provinsi Bali periode 2022–2024 mengindikasikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Secara normatif, LKPD Provinsi Bali telah memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang tercermin dari kelengkapan komponen laporan keuangan, penerapan basis akrual, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Namun demikian, kualitas laporan keuangan selama periode pengamatan belum sepenuhnya optimal. Tantangan utama masih berkaitan dengan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah, konsistensi pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta kesanggupan sumber daya manusia dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual secara komprehensif. Temuan-temuan tersebut bersifat tidak material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, namun menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SAP tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga pada efektivitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu dapat menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat ter dorong oleh faktor pendukung implementasi SAP, semacam kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi keuangan, dan efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas LKPD Provinsi Bali pada periode selanjutnya perlu diarahkan pada penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah, serta optimalisasi pengungkapan informasi keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada LKPD Provinsi Bali periode 2022-2024 dengan umum telah berjalan dengan baik dan berkontribusi baik terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Keberhasilan ini tercermin dari pemenuhan karakteristik kualitatif seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, serta pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara terus-menerus. Meskipun demikian, kualitas laporan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi

tantangan pada penatausahaan aset tetap yang belum tertib, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam akuntansi akrual, serta perlunya peningkatan kedalaman pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Oleh karena itu, peningkatan kualitas di masa depan memerlukan penguatan sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan yang efektif secara berkelanjutan, melampaui sekadar kepatuhan terhadap regulasi.

DAFTAR REFERENSI

- Alal Maula, M. I., & Wibowo, P. (2022). Meneropong determinan opini LKPD kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Bina Ekonomi*, 26(1), 23–37. <https://doi.org/10.26593/be.v26i1.5341.23-37>
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(3), 403–428.
- Halawa, Y., & Nazah, H. (2023). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terhadap kinerja keuangan di Kantor Pemerintahan Kecamatan Medan Tuntungan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 10310–10317.
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia: Literature review. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(2), 157–171.
- Hernusa, H. L., & Royani, L. (2022). Tinjauan atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(3). <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1519>
- Jamaluddin, & Muttaqim, H. (2025). The effects of human resource competencies, internal controls, and accrual accounting on financial report quality. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(4), 2757–2768. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i4.3405>
- Jusmani, J., Hendri, E., & Kurniawan, T. B. (2022). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 199–212.
- Khairunnas, K., Erawati, T., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 483–497. <https://doi.org/10.26618/inv.v3i2.6049>
- Lamonisi, S. (2016). Analisis penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Lauma, E. B., Morasa, J., & Kalangi, L. (2016). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Accountability*, 5(2), 84–97.
- Muwarni, A. S., & Astuti, R. P. (2022). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/7126>

- Natanael, Y. A., & Jamaris, E. (2023). Pengaruh penerapan SAP, kualitas SDM, penerapan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. *[Nama jurnal tidak dicantumkan, 2]*.
- Suhardi. (2025). The effect of information technology, HR competence, internal control, and organizational culture on the quality of financial reports. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13(2)*, 311–326. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i2.3262>
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(4)*.
- Yanti, N. S., & Made, A. (2020). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 8(1)*.